

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU AZHAR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 36290

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.743.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1700 m²/130 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.380.000.000
2. Tanah Seluas 5700 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
3. Tanah Seluas 15625 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.656.250.000
4. Tanah Seluas 2750 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 165.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/35 m² di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO CW Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.450.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 27.438.126**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 5.921.138.126



III. HUTANG

Rp. 202.327.497

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.718.810.629

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.